

**PENGELOLAAN LAHAN PESISIR UNTUK USAHA
PERTANIAN DAN PARIWISATA SEBAGAI UPAYA
PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT
DI KABUPATEN BANTUL**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh sebutan
Sarjana Sains Terapan



Oleh :
MUHAMMAD NURDIN SHOLEKAN
NIM 07162307/P

**SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
YOGYAKARTA
2011**

pertanian oleh masyarakat (pola 1), dan Pengelolaan lahan untuk pertanian oleh investor/swasta (pola 4). Dilihat dari segi keberlanjutan usaha yang didasarkan pada prinsip pembangunan berkelanjutan ada 3 pola yang dianggap sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Pola yang paling mendukung pembangunan yang berkelanjutan adalah Pola pengelolaan lahan untuk tanaman kehutanan (Pola 2), yang kedua adalah Pola Pengelolaan lahan untuk pertanian oleh masyarakat (pola 1), dan terakhir Pola Pengelolaan lahan untuk pariwisata berkelompok (pola 3).

Abstract

The coastal area in Bantul Regency is an area which potentially developed. The area is not cultivated because is not so fertile, unbenefitable status, and there is not any infrastructures support . Related to the development, the needs of rice field, shops, and settlement are rising. In the end, people realize the huge potency of this coastal area.

This research is about the activity of the people to manage the coastal area in Sanden and Srandakan District. Pricesly located in Srigading, Gadingsari, and Poncosari Villages. Research methode that used is Qualitatif Research Methode, with Sustainable Livelihood Approach.

The activity of the people, private sektors, and government make sistems of the land management. There are amount influences of land tenurial in the establishmen of the coastal area managemen sistems. At least, there are six (6) sistems found by writer by the identification in location. (1) Land management system for agriculture by people; (2) Land management system for foresting; (3) Land management system for modern tourism as groups; (4) Land management system for tradisional tourism individually; (5) Land management system for agriculture by private sektors; (6) Land management system for government instalations. Research focus in agriculture and tourism. The sistems in agriculture category is Sistem (1), (2), and (5). Sistem (6) is not the part of both category.

Based on the analize the land management sistems which influence the economic developed for people are three : 1st is system (3) Land management system for modern tourism as groups; 2nd is system (1) Land management system for agriculture by people; 3rd is system (5) Land management system for agriculture by private sektors. Related to the sustainable development there are three suitable systems: 1st is system (2) Land management system for foresting; 2nd is system (1) Land management system for agriculture by people; 3rd is system (3) Land management system for modern tourism as groups.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
MOTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
INTISARI	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Batasan Masalah.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Pustaka	
1. Pantai.....	9
2. Pesisir.....	9
3. Pola Pengelolaan	11
4. Usaha	12
5. Pertanian	12
6. Pariwisata.....	13
7. Pendekatan Penghitungan Kualitas Ekonomi.....	14
8. Penguasaan Tanah	16
9. <i>Sustainable development</i>	26
B. Kerangka Pemikiran	31
C. Batasan Operasional	33
BAB III METODE PENELITIAN	

A. Format Penelitian	36
B. Lokasi Penelitian	38
C. Jenis-jenis Sumber Data	38
D. Teknik Pengumpulan Data	40
E. Analisis Data	42
F. Teknik Pemilihan Informan.....	43
G. Sistematika Penulisan	44
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH	
A. Keadaan Wilayah.....	45
B. Kondisi Fisik Wilayah Kabupaten Bantul.....	49
C. Jumlah dan kepadatan penduduk.....	56
D. Kondisi Sosial Ekonomi	58
BAB V POLA PENGELOLAAN LAHAN PESISIR KABUPATEN	
BANTUL	
A. Penguasaan Tanah di Kecamatan Sanden dan Srandakan.....	64
B. Penguasaan tanah SG di Pesisir Kabupaten Bantul.....	66
C. Jenis Pola Pengelolaan Lahan	68
D. Intitusi yang berperan Dalam Pengelolaan Kawasan Pesisir	79
E. Organisasi masyarakat yang berperan dalam pengelolaan pesisir	81
F. Proses pemberdayaan masyarakat	89
BAB VI PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT	
A. Potensi Ekonomi Setiap Pengelolaan	95
B. Penguatan Ekonomi Masyarakat Dari Pola Pengelolaan Lahan	104
BAB VII HUBUNGAN POLA PENGELOLAAN DENGAN	
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	
A. Prinsip Pembangunan Berkelanjutan	111
B. Penerapan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan di Kawasan Pesisir...	112
C. Rekapitulasi pola pengelolaan pada masing-masing lokasi berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan	115
KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	120
B. Saran	121
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wilayah pesisir Kabupaten Bantul, secara geografis terletak di bagian selatan Kabupaten Bantul. Letaknya memanjang mengikuti garis pantai dengan lebar ke arah darat bervariasi, biasanya dibatasi oleh batas-batas fisik yang mudah dikenali seperti jalan, sungai, perbedaan level tanah, perbedaan jenis tanah dan lainnya. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul dengan batas fisik berupa pegunungan kapur, di sebelah barat di batasi oleh Sungai Progo. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera *Hindia*.

Pada awalnya wilayah ini kurang mendapatkan perhatian dari masyarakat. Masyarakat kurang berminat memanfaatkan lahan di sepanjang pesisir ini, baik untuk usaha pertanian pariwisata atau lainnya. Alasan yang *pertama* adalah kondisi lahan pada waktu itu masih berupa semak belukar, terlihat gersang, tandus dan panas. Alasan *kedua* tanah di sepanjang pesisir merupakan tanah yang dipercaya masyarakat sebagai *Sultan Grond (SG)*, tanah yang dimiliki oleh Kesultanan Yogyakarta.

Seiring perkembangan zaman, yang diikuti dengan kebutuhan tanah yang makin meningkat, masyarakat mulai memanfaatkan lahan pesisir sebagai lahan pertanian. Pertanian itu sendiri meliputi pertanian pangan, hortikultura, kehutanan, dan peternakan. Pariwisata juga

berkembang di wilayah ini, hamparan lahan pasir yang luas serta sejumlah keindahan di sana adalah daya tarik bagi wisatawan.

Upaya pengembangan usaha pertanian (bercocok tanam) di lahan pesisir seringkali dihadapkan pada kendala ekologis yaitu sifat lahan pesisir itu sendiri. Material pembentuk lahan pesisir di sini sebagian besar adalah pasir yang memiliki porositas tinggi, sehingga daya ikat air rendah. Keadaan ini menyulitkan dalam pemanfaatan lahan untuk pertanian. Budidaya pertanian seperti penanaman bawang merah, ketela, dan buah, bahkan padi misalnya, mungkin dilakukan di kawasan ini. Syaratnya lahan diperlakukan sedemikian rupa hingga tanaman-tanaman tersebut dapat tumbuh maksimal. Selama ini petani mendapat margin cukup karena subsidi sarana produksi yang tidak dibeli dengan uang. Pupuk didapat dari kotoran ternak di kandang ternak pribadi dan dari limbah dan tanaman yang difermentasi secara mandiri, bibit disemai sendiri, tenaga juga mengambil dari keluarga. Sehingga keuntungan yang didapat dikurangi dengan pembelian sarana produksi yang memang harus dibeli saja, misalnya mulsa, pemompaan air, dan insektisida. Pertanian dalam arti luas termasuk di dalamnya tanaman pangan, peternakan, dan perikanan mengambil bagian cukup besar dalam pengelolaan pesisir. Sebagian wilayah ini masih didominasi oleh pemanfaatan untuk usaha-usaha pertanian tersebut.

Selain pertanian saat ini ada beberapa lokasi yang dikuasai, dan dikembangkan oleh masyarakat secara mandiri untuk usaha pariwisata.

Lokasi tersebut antara lain; Pantai Depok di Kecamatan Kretek, Pantai Kuwaru, Pantai Pandan Simo, Pantai Baru di Kecamatan Srandakan, Pantai Samas, dan Pandansari di Kecamatan Sanden dan lainnya. Sejatinnya kawasan tersebut sudah lama terbuka, tetapi pengelolaan yang lebih baik baru dilakukan beberapa tahun terakhir. Sebagian kawasan tersebut dikunjungi wisatawan setiap minggunya, jumlahnya hingga puluhan ribu orang setelah dikelola masyarakat dengan baik. Pengelolaan mendatangkan pendapatan masyarakat yang tidak sedikit, eskalasi pendapatan begitu tajam terlihat dengan berbagai fasilitas yang dibangun masyarakat di kawasan wisata tersebut, baik yang sifatnya individu pribadi maupun yang sifatnya untuk kepentingan umum demi kenyamanan pengunjung.

Pariwisata menjadi semacam solusi baru kesejahteraan di kawasan-kawasan tersebut atas kesulitan ekonomi masyarakat. Sebagian masyarakat menerjunkan diri menjadi pelaku pariwisata. Diantara mereka banyak yang sepenuhnya bergantung pada pariwisata karena sebelumnya memang tidak memiliki pekerjaan tetap. Kegiatan yang dilakukan pun beragam, pariwisata di wilayah ini bukan lagi hanya menikmati pemandangan saja, tetapi telah berdiversifikasi ke sektor perdagangan, jasa, kuliner, dan sebagainya.

Setidaknya masyarakat mempunyai 3 (tiga) pilihan untuk membudidayakan lahan pesisir di Kabupaten Bantul ini. *Pertama* masyarakat mengelola lahan pesisir ini untuk budidaya pertanian (arti

luas), dengan konsekuensi margin yang didapat tidak besar, tetapi tentu memiliki andil yang cukup besar dalam menjaga ekologi. *Kedua* masyarakat mengelola lahan pesisir untuk budidaya non pertanian khususnya pariwisata. Pariwisata memiliki andil cukup besar secara ekonomi bagi masyarakat yang mengelola lahan pesisir dengan baik serta memberikan andil terhadap kelangsungan hidup lingkungan. *Ketiga* memadusersasikan kedua pilihan tersebut, yang secara logika juga mungkin dilakukan.

Apabila kita telaah dari perspektif yang lebih tinggi, pada level kebijakan pemerintah, maka kita akan menjumpai kebijakan yang senada dengan fenomena yang terjadi di masyarakat pesisir (Kabupaten Bantul). Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia mencanangkan 4 prinsip Pengelolaan Pertanahan yang tertuang dalam Sasaran Strategis Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 2010-2014, yang secara singkat diuraikan sebagai berikut : “Pertanahan harus berkontribusi secara nyata :

- (1) Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, penciptaan sumber-sumber baru kemakmuran rakyat, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan serta peningkatan ketahanan pangan (*prosperity*);
- (2) Untuk peningkatan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dan bermartabat dalam kaitan dengan P4T (*equity*);
- (3) Untuk mewujudkan tatanan kehidupan bersama yang harmonis dengan mengatasi sengketa, sengketa dan konflik dan perkara di kemudian hari (*social welfare*);
- (4) terciptanya keberlanjutan sitem kemasyarakatan, kebangsaan dan

kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi yang akan datang terhadap tanah sebagai sumber kesejahteraan masyarakat (*sustainability*)". (www.bpn.go.id/renstra.aspx diunduh tanggal 22 februari 2011).

Kegiatan yang dilakukan masyarakat mengelola kawasan pesisir sebagai lahan usaha secara tidak langsung sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut di atas. Ratusan hektar lahan menjadi sumber pangan dan menjadi sumber pendapatan. Ratusan anggota masyarakat bergantung pada usaha-usaha pertanian. Sebagian masyarakat lainnya menggantungkan hidup dari usaha-usaha di bidang pariwisata. Mulai dari berjualan makanan dan minuman, membuat sarana hiburan bagi pengunjung, menyewakan berbagai barang, hingga mendirikan rumah makan.

Patut disayangkan baik kegiatan pertanian maupun kegiatan wisata tersebut hampir seluruhnya berada di atas tanah berstatus *Sultan Grond* (SG). Berdasarkan informasi, masyarakat sepenuhnya sadar bahwa mereka menempati tanah kepunyaan Sultan. Mereka tidak khawatir mendirikan bangunan, mendirikan tempat usaha, bahkan rumah sebagai tempat tinggal. Secara administrasi hubungan hukum mereka dengan tanah tersebut tidak kuat, karena tanpa hak, tanpa sertipikat, bahkan diantara mereka tanpa ijin. Mereka mengelola tanah tersebut didasarkan pada kesepakatan oleh para pendahulu mereka yaitu para orang tua mereka yang lebih dulu menguasai tanah-tanah tersebut.

Idealnya masyarakat mengelola tanah untuk pertanian dan pariwisata diatas tanah yang secara administratif legal, secara fisik lingkungan benar, dan secara ekonomi menjanjikan. Hal ini adalah sebagian penentu yang akan melahirkan penguatan ekonomi dan keberlanjutan (*sustainability*) pembangunan.

Bertolak dari uraian di atas calon peneliti tertarik meneliti pengelolaan lahan di kawasan Pesisir Kabupaten Bantul ini. Calon peneliti mengambil judul **“PENGELOLAAN LAHAN PESISIR UNTUK USAHA PERTANIAN DAN PARIWISATA SEBAGAI UPAYA PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT DI KABUPATEN BANTUL”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam latar belakang di atas calon peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Pola pengelolaan pertanian dan pola pengelolaan wisata seperti apa yang ada di Pesisir Kabupaten Bantul?
2. Apakah pola-pola pengelolaan tersebut dapat berkontribusi positif terhadap penguatan ekonomi masyarakat?
3. Berkaitan dengan pembangunan yang berkelanjutan, apakah pola-pola dimaksud telah sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*)?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah :

- a. Mengetahui Pola pengelolaan pertanian dan wisata kawasan pesisir Kabupaten Bantul.
- b. Mengetahui apakah pola-pola pengelolaan dimaksud dapat berkontribusi positif terhadap penguatan ekonomi masyarakat.
- c. Mengetahui apakah pola-pola pengelolaan yang ada di kawasan pesisir Kabupaten Bantul sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

2. Kegunaan

- a. Nantinya diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dibahas secara detail potensi pesisir, dan pola-pola pengelolaan yang baik, serta sesuai dengan karakteristik wilayah
- b. Dengan adanya penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan kepada segenap pemangku kepentingan untuk dapat berperan aktif mengembangkan potensi wilayah dimaksud.
- c. Peneliti berharap prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi visi untuk setiap kebijakan pemerintah yang ditempuh, juga menjadi visi bagi pembangunan yang berbasis pemberdayaan masyarakat.

D. Batasan Masalah

Melihat cakupan yang sangat luas dalam upaya pengelolaan lahan pada kawasan pesisir, penyusun memberikan batasan pada jenis pengelolaan lahan untuk kegiatan pertanian dan kegiatan pariwisata. Kegiatan pertanian meliputi tanaman pangan, peternakan, dan perikanan. Sementara pariwisata terdiri atas subsektor perdagangan, restoran, hotel, dan jasa-jasa. Pertanian dan pariwisata dimaksud adalah yang dilakukan oleh masyarakat di atas lahan pesisir Kabupaten Bantul tepatnya di Kecamatan Sanden dan Srandakan.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian dalam bab sebelumnya dapat dinyatakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pola Pengelolaan lahan untuk pertanian dan wisata di pesisir Kabupaten Bantul

Pola Pengelolaan Pesisir untuk Usaha Pertanian dapat disimpulkan menjadi 3 pola yaitu :

- a. Pola Pengelolaan lahan pesisir untuk usaha Pertanian oleh Masyarakat
- b. pola pengelolaan Lahan Pesisir untuk pertanian oleh Investor/swasta.
- c. Pola Pengelolaan lahan untuk tanaman Kehutanan.

Pola Pengelolaan Lahan Pesisir untuk Usaha Pariwisata dapat kita bagi menjadi 2 yaitu:

- a. Pola pengelolaan lahan pesisir untuk pariwisata tradisional
 - b. Pola Pengelolaan Lahan Pesisir untuk pariwisata dalam kelompok.
- #### 2. Pola Pengelolaan berkontribusi Positif terhadap penguatan ekonomi masyarakat.

Pola yang paling dianggap berkontribusi positif terhadap ekonomi masyarakat adalah berurut-turut sebagai berikut :

- a. Pola Pengelolaan Untuk Usaha Pariwisata dalam kelompok
- b. Pola Pengelolaan Untuk Usaha Pertanian oleh Masyarakat,
- c. Pola Pengelolaan Untuk Usaha Pertanian oleh Investor/Swasta;

3. Pola Pengelolaan lahan sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pola yang sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan adalah sebagai berikut :

- a. Pola Pengelolaan lahan untuk tanaman kehutanan
- b. Pola pengelolaan lahan untuk usaha pertanian oleh masyarakat
- c. Pola pengelolaan lahan pariwisata dalam kelompok

B. Saran

Masyarakat adalah komponen penting dalam pengelolaan lahan pesisir, sehingga peran serta yang aktif merupakan suatu keharusan. Peran itu dapat berwujud keaktifan sebagai pengelola maupun sebagai piranti kontrol terhadap pembangunan dan investasi. Posisi sentral masyarakat atas penguasaan lahan tentu harus dimanfaatkan dengan baik, dalam rangka mengontrol keberadaan investasi yang merugikan masyarakat sekitar. Sebaliknya mendukung pembangunan yang sifatnya menguntungkan masyarakat dalam jangka panjang secara langsung maupun tidak langsung.

Kelompok Tani adalah organisasi kemasyarakatan dalam lingkup kecil masyarakat dusun yang dapat berperan penting dalam pengelolaan lahan pesisir. Menejemen organisasi yang baik dengan memberdayakan anggota kelompok yang potensial menjadi keharusan. Dalam kelompok ini juga seharusnya diatur tata cara atau sistem pengalihan lahan. Menjaga lahan tetap dalam kelompok dan mengusahakan secara serius adalah jalan terbaik

pengelolaan lahan pesisir untuk pertanian. Selain dari aktif berkomunikasi ke dalam dan keluar kelompok termasuk dengan dinas dan instansi terkait.

Kelompok masyarakat sadar wisata yang saat ini ada di semua dusun di wilayah penelitian belum semua aktif. Kelompok yang aktif seharusnya dapat mendorong kelompok lainnya yang tidak aktif untuk dapat berkembang bersama. Kesadaran akan pembangunan berkelanjutan perlu dipupuk dalam kelompok-kelompok supaya pengelolaan dapat terus berlanjut dalam waktu yang lama.

Dukungan pemerintah mutlak diperlukan dalam setiap pengelolaan lahan pesisir, baik untuk pertanian dan wisata. Perlu adanya *insentif* dan *disinsentif* bagi pengelolaan terkait dengan lingkungan. Pengelolaan yang memperhatikan dan sesuai dengan peraturan didorong untuk berkembang dengan diberikan bantuan dan pendampingan, sementara yang tidak sesuai ditertibkan. Dinas pertanian dan kehutanan cukup banyak berperan dalam pengelolaan pesisir di bidangnya. Meskipun sarana-prasarana sudah hampir seragam tetapi terdapat variasi hasil dan intensitas kegiatan. Bantuan dalam bentuk transfer ilmu dan teknologi kepada masyarakat sangat diperlukan.

Badan Pertanahan Nasional dalam hal ini Kantor Kabupaten Bantul belum bisa berperan banyak. Status tanah di kawasan pesisir menjadi kendala bagi Badan Pertanahan Nasional untuk ikut berperan aktif. BPN Perlu melakukan Koordinasi dengan pihak kraton dalam rangka:

1. Menginventarisasi penguasaan tanah-tanah SG di pesisir, bukan hanya memetakan tanah SG, tetapi memetakan penguasaan individu di dalamnya secara rinci.
2. Memperjelas status tanah SG dalam hukum tanah nasional, dengan memperjelas status tanah, konflik di kemudian hari dapat dihindari.

Investor/swasta masih belum berperan dalam mengangkat ekonomi masyarakat. Luas lahan yang dikelola swasta/investor belum sebanding dengan jumlah tenaga yang terserap dalam usaha itu. Proses transfer ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) juga belum ada, karena masyarakat hanya berperan sebagai buruh kasar dan atau tenaga keamanan. Sebaiknya investor/swasta menarik lebih banyak tenaga dari masyarakat sekitar, dan dapat melibatkan masyarakat dalam kegiatan perusahaan sebagai bagian dari proses tranfer iptek.

Dalam tulisan ini masih mungkin untuk dikembangkan analisis mengenai keberadaan pola pada setiap dusun. Dari keberadaan pola yang berkembang tersebut dapat dilihat potensi dusun dan kontribusi pola-pola tersebut dalam ekonomi masyarakat ataupun sumbangan kepada pendapatan asli daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrianto, Luky. (2006). “ Pengenalan Konsep dan Metodologi Valuasi Ekonomi Sumber Daya Pesisir dan Laut” Sinopsis. IPB, Bogor
- Azwar, Saifuddin. (2005). Metode Penelitian. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- BPS Kabupaten Bantul. (2008). “Produk Domestik Regional Bruto Kecamatan Kabupaten Bantul Tahun 2007-2008” BPS Kab. Bantul, Bantul.
- Cahyono, Bambang Tri. (1983). “Pengelolaan Sumber Daya”. Liberty, Yogyakarta
- Dahuri, Rokhmin dkk.. (2008). “Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu”. PT Pradnya Paramita, Jakarta
- Dinas Budaya dan Pariwisata Kabupaten Bantul (2010). “ Laporan Penerimaan Retribusi Objek Wisata Kabupaten Bantul”
- Dinas pertanian dan kehutanan Kabupaten bantul (2010). Laporan Kegiatan Bidang Kehutanan Tahun 2010”.
- Dinas pertanian dan kehutanan Kabupaten bantul (2010). Laporan Kegiatan Bidang Holtikultura tahun 2011”.
- Harsono, Boedi (2007). “Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya” Penerbit Djambatan. Jakarta
- Hardjasoemantri, Koesnadi, (2000), “Hukum Tata Lingkungan”, Edisi Ketujuh Cetakan Kelima Belas, Penerbit Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Kedaulatan Rakyat.” (2011) : “Menanti Pantai Samas Menjadi Taman Ancol” artikel 9 maret 2011.
- Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, (2011). “Program Penanggulangan Kemiskinan Melalui Desa Wisata dengan PNPM Mandiri Pariwisata” Naskah Sosialisasi, tidak dipublikasikan.
- Khakhim, Nurul. (2008). “Analisis Preferensi Visual Lanskap Pesisir Daerah Istimewa Yogyakarta Untuk Pengembangan Pariwisata Pesisir Menuju Pada Pengelolaan Wilayah Pesisir Berkelanjutan”. Makalah (tidak dipublikasikan), Yogyakarta (diunduh 22 Januari 2011)

- Moleong, Lexy. J. (2008). Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nugroho, Aristiono. (2007). "Panduan singkat Penggunaan Metode Kualitatif dalam Penelitian". Modul.STPN (tidak dipublikasikan), Yogyakarta
- Purwoko, Taufiq Tri (2009). "Persepsi Masyarakat Terhadap Nilai Sosiohistoris Tanah Sultan Grond Di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Skripsi STPN Yogyakarta
- Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa (1998),"Kamus Besar Bahasa Indonesia", Balai Pustaka, Bandung.
- Supriharyono. (2000). "Pelestarian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Pesisir Tropis". PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. (2011). Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Soetarto, Endriatmo (2008) Metode Penilaian Tanah untuk Berbagai Kepentingan dalam <http://bemstpn.org>
- Singarimbun, Masri dan Sofian Efendi (1989). "Metode Penelitian Survei" LP3ES, Jakarta
- Suyitno (2009). "Tanah Kasultanan (SG) Dan Tanah Pakualaman (PAG) Tinjauan Historis-Yuridis". Balai Senat Universitas Gadjahmada. Yogyakarta
- Tjondronegoro, Soediono dan Gunawan Wiradi. (1984). "Dua Abad Penguasaan Tanah". PT. Gramedia, Jakarta.
- Widodo, Aris Slamet. (2007). "Kajian Usaha Tani Lahan Pantai di Kabupaten Bantul". Makalah, (tidak dipublikasikan). Yogyakarta
- Rencana Strategis Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (www.bpn.go.id/renstra.aspx) (diunduh tanggal 22 februari 2011).
- Rencana Strategis (RENSTRA) Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut Terpadu Kabupaten Bantul 2007.
- Profile Kabupaten Bantul, www.bantulkab.go.id, (diunduh secara berkala mulai Mei 2011 hingga Juni 2011)

DAFTAR PERATURAN

Undang–undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Surat Edaran Panitikismo kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta No : 138/wak/2000 tanggal 22 September tahun 2000.